

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN JEMBER

(APLIKASI ANALYTHICAL HIERARCHY PROCESS)

Henggarsyah Aria Utama (Mahasiswa), Anifatul Hanim (DPU), Moh. Adenan (DPA)
Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: henggarariahutama@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan sebagai strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menetapkan skala prioritas pada setiap program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember. Hasil analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) menunjukkan dari 5 kriteria yang dipertimbangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, prioritas pertama adalah berbasis pemberdayaan yang mencakup Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja/ padat karya produktif. Prioritas kedua yaitu berbasis program pro-rakyat yang mencakup program sosialisasi pengenalan TI, literasi keuangan untuk masyarakat pedesaan dan pinggir perkotaan, kendaraan umum dan listrik murah dan peningkatan kehidupan nelayan. Prioritas ketiga yaitu berbasis pemberdayaan usaha ekonomi yang mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). Sedangkan prioritas terakhir yaitu berbasis bantuan dan perlindungan sosial mencakup program BPJS Kesehatan, bantuan beras miskin (raskin), bantuan beasiswa pendidikan (BSM), dan program keluarga harapan (PKH)

Kata kunci: Strategi, Kebijakan, Kemiskinan

Abstract

This study aims to formulate policy alternatives that can be used as a strategy in poverty alleviation efforts and set priorities for each program to reduce poverty in Jember. Results of analysis Analytical Hierarchy Process (AHP) shows off five criteria considered in the poverty reduction strategy, the first priority is the empowerment that includes the National Program for Community Empowerment (PNPM) and the expansion and development of employment / labor-intensive productive. The second priority is based pro-people programs that include outreach programs the introduction of IT, financial literacy to rural communities and urban edge, public transportation and cheap electricity and improvement of the lives of fishermen. The third priority is economic empowerment-based effort that includes the People's Business Credit (KUR) and Credit Joint Venture (KUBE). While the last priority is based assistance and social protection cover BPJS Health program, the rice aid poor (Raskin), scholarship assistance (BSM), and family programs expectation (PKH)

Key words: Strategy, Policy, Poverty

Pendahuluan

Pembangunan adalah suatu proses dimensial yang mencakup beberapa aspek seperti perubahan struktur, siklus hidup dan kelembagaan, selain itu juga mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual.

Pembangunan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan Gross National Product (GNP), baik secara agregat maupun per kapita yang akan menciptakan lapangan kerja dan berdampak pada peningkatan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan trickle down effect. Indikator pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP, tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan maupun penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada dan mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan

untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Salah satu faktor yang menjadi indikator sukses atau tidaknya pembangunan daerah adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Pembangunan daerah yang diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum tentu menjadi solusi atas terjadinya ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak mencerminkan adanya pembangunan di suatu daerah. Keberhasilan pembangunan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2011 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7,22 % yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,50 %. Dibalik keberhasilan pembangunan di Jawa Timur, ternyata masih menyisakan permasalahan ekonomi yang mencemaskan yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi maupun pendidikan yang rendah. Tingkat kemiskinan Jawa Timur 14,23 persen, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen dan pendidikan di Jawa Timur sebesar 88,79 persen, lebih rendah dibanding pendidikan nasional sebesar 92,99 persen.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan khususnya di Jawa Timur mempunyai keterkaitan yang erat. Sebagian ahli ekonomi berasumsi bahwa pertumbuhan yang cepat, akan berakibat buruk terhadap kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Sebagian lain berpendapat bahwa konsentrasi untuk pengentasan kemiskinan, memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember yang cenderung meningkat setiap tahun, akan tetapi belum diimbangi oleh penurunan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tercatat sebanyak 237.700 rumah tangga miskin yang berada di garis kemiskinan. Kabupaten Jember menempati urutan pertama daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur, sedangkan posisi kedua ditempati Kabupaten Bondowoso dan ketiga ditempati Kabupaten Malang (Purnomo, 2013). Presentase penerima raskin di Kabupaten Jember mencapai 192 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sementara jumlah penerima program BPJS Kesehatan sebanyak 930 ribu jiwa. Hal tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan masih belum optimal.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kajian dalam penelitian ini meliputi angka kemiskinan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan di Kabupaten Jember maupun program yang akan dirumuskan. Data pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara maupun kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. Populasi yang diambil dari penelitian ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Jember yang meliputi rumah tangga hampir miskin, miskin, dan sangat miskin.

Analisis Deskriptif

Analisis dekriptif digunakan untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk penggambaran secara tegas tentang populasi yang menemukan distribusi dalam beberapa atribut.

Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah metode pengambilan keputusan untuk suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kemudian dipecahkan, dikelompokkan dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Jamiel, Pyszczyński dan Shannon, 1999:173). Analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam situasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multifaktor dan mencakup berbagai jenjang kepentingan.

Metode ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, guru besar Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1971 sampai 1975 (Saaty 1980:72). Saaty menyatakan bahwa AHP adalah suatu model untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-asumsi dalam memperoleh pemecahan yang diinginkan, serta memungkinkan menguji kepekaan hasilnya. Dalam prosesnya, data utama yang diperlukan adalah persepsi manusia yang dianggap expert, dimana criteria expert bukan berarti jenius, pintar atau bergelar doctor maupun professor, melainkan lebih mengarah pada orang yang lebih mengerti, paham benar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian.

Dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan, metode *Analytical Hierarchy Proses* (AHP) memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain :

1. Dekomposisi, yaitu proses memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya kedalam bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen yang saling berhubungan. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang akurat, dilakukan pemecahan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lanjutan, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan;
2. Comparative Judgment, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari Analytic Hierarchy Proses (AHP), karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas elemen-elemennya. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matrik perbandingan berpasangan (matrik pairwise comparasion) memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria;
3. Synthesis of priority, dari setiap matrik pairwis comparisson eigen vector mempunyai ciri untuk mendapatkan prioritas-prioritas lokal. Karena matrik pairwise dapat serap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarki;

4. Logical Consistency, yaitu konsistensi yang memiliki dua makna. yaitu pertama adalah obyek-obyek yang berupa alat dikelompokkan sesuai keragaman elevansinya. Kedua, tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Hasil Penelitian

Karakteristik Kemiskinan Di Kabupaten Jember

Daerah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Jember, diantaranya Kecamatan Tempurejo sebanyak 9.470 RTM, Kecamatan Silo sebanyak 14.105 RTM, Kecamatan Mumbulsari sebanyak 11.550 RTM, Kecamatan Sumberbaru sebanyak 13.516 RTM, Kecamatan Bangsalsari 13.197 RTM, Kecamatan Kalisat 12.247 RTM, Kecamatan Ledokombo 13.035 RTM, Kecamatan Sumberjambe 11.945 RTM dan sebanyak 11.309 RTM di Kecamatan Sukowono. Karakteristik keluarga miskin di Kabupaten Jember dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosial, kondisi lingkungan pemukiman keluarga miskin, pola hidup keluarga miskin, kondisi sandang pangan keluarga miskin. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember sendiri terdiri atas suku Jawa dan Madura, selain itu terdapat warga Tionghoa dan suku Osing. Suku Madura terlihat dominan di Kabupaten Jember bagian utara dan merupakan mayoritas di sejumlah tempat. Apabila dipandang dari aspek geografis, daerah yang menjadi kantong kemiskinan di Kabupaten Jember yaitu di wilayah utara tepatnya di kecamatan Kalisat yang mayoritas penduduknya berkulturnya Madura. Sedangkan di daerah Selatan jumlah penduduknya lebih sedikit dibandingkan dengan daerah Utara seperti kecamatan Ambulu yang mayoritas masyarakatnya berkulturnya Jawa.

Analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Berdasarkan analisis AHP, Dari 4 kriteria sebagai prioritas upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember dengan hasil sebagai berikut:

1. Berbasis pemberdayaan masyarakat dianggap sebagai prioritas paling penting dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember (nilai bobot 0,372 atau 37,2%) dengan alternatif PNPM Mandiri (nilai bobot 0,667 atau 66,7%) dan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif.

2. Berbasis program-program pendukung lain/ Pro-Rakyat sebagai prioritas kedua (nilai bobot 0,241 atau 24,1%) dengan alternatif program Kendaraan Umum dan Listrik Murah (nilai bobot 0,355 atau 35,5%), Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan (nilai bobot 0,355% atau 35,5%), Literasi Keuangan Untuk Masyarakat Pedesaan dan Pinggir Perkotaan (nilai bobot 0,145 atau 14,5%), Sosialisasi Pengenalan Teknologi dan Informasi (nilai bobot 0,145 atau 14,5%).

3. Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi sebagai prioritas ketiga (nilai bobot 0,234 atau 23,4%) dengan alternatif program Kredit Usaha Rakyat (KUR) (nilai bobot 0,833 atau 83,3%), Kredit Usaha Bersama (KUBE) (nilai bobot 0,167 atau 16,7%).

4. Berbasis bantuan dan perlindungan sosial sebagai prioritas terakhir (nilai bobot 0,153 atau 15,3%) dengan alternatif Program Keluarga Harapan (PKH) (nilai bobot 0,380 atau 38%), Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin (nilai bobot 0,237 atau 23,7%), Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Keluarga Miskin (BSM) (nilai bobot 0,217 atau 21,7%), dan BPJS Kesehatan (nilai bobot 0,167 atau 16,7%).

Pembahasan

Secara garis besar persepsi mengenai kemiskinan baik di kalangan akademisi, birokrat, dan politisi dapat dikelompokkan dalam tiga mazhab menurut Hutomo (dalam Purnomo, 2013). Mazhab pertama sering disebut mazhab magical, yang berpandangan bahwa kemiskinan adalah suatu takdir yang harus diterima seperti adanya. Bentuk refleksi dari mazhab magical ini adalah, bahwa orang miskin karena ditakdirkan oleh sang pencipta. Adanya orang miskin dan kaya adalah sesuatu yang wajar. Argumentasi mazhab ini, tidak mungkin semua orang menjadi miskin. Bentuk aksi dari mazhab ini adalah penyesuaian (confirmis) atau menerima apa adanya terhadap takdir dan terhadap struktur sosial, politik, dan struktur ekonomi yang sudah dianggap given. Mazhab kedua disebut sebagai mazhab naive. Mazhab ini berpandangan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor-faktor internal yang dimiliki atau melekat pada orang miskin itu sendiri. Faktor-faktor internal tersebut misalnya pendidikan yang rendah, keterampilan kurang, rendahnya modal, kondisi alam yang tidak baik, kesehatan buruk, dan partisipasi politik rendah adalah faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Solusi untuk memecahkan kemiskinan adalah melalui human resources development, sosial capital development, physical infrastructure development, dan pemberian fasilitas permodalan. Pandangan mazhab ini sebagian besar mendominasi perencanaan-perencanaan pembangunan di negara dunia ketiga. Menurut mazhab ini struktur ekonomi, struktur politik, dan struktur sosial yang adalah given, oleh karena itu, bentuk aksi atau solusi yang ditawarkan oleh mazhab ini adalah reformasi (reformis). Mazhab ketiga disebut sebagai mazhab critical. Mazhab ini memiliki pandangan bahwa orang miskin terjadi karena dimiskinkan oleh sistem atau sebuah struktur. Adapun struktur yang dimaksud bukan saja struktur ekonomi tetapi juga struktur politik, ekonomi dan sosial budaya. Adanya struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya yang memungkinkan terjadinya akumulasi kekayaan dan kekuasaan disuatu kelompok masyarakat di satu pihak, dan kurang memberi kesempatan pada kelompok masyarakat yang lain untuk berperan aktif dan turut serta dalam pembangunan politik dan ekonomi adalah penyebab terjadinya kemiskinan.

Perspektif mengenai kemiskinan penting untuk dipahami sebelum melakukan analisis strategi penanggulangan kemiskinan, karena sebuah perspektif akan sangat mempengaruhi pilihan strategi dalam memecahkan masalah kemiskinan. Artinya, efektivitas strategi penanggulangan kemiskinan akhirnya akan ditentukan oleh kesalihan asumsi yang digunakan. Apabila asumsi mazhab magical benar, maka pendekatan confirmis tepat dalam rangka

penanggulangan kemiskinan. Apabila asumsi yang digunakan oleh mazhab naive memang sah, maka pendekatan reformis adalah pendekatan yang tepat dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Sebaliknya bila asumsi dari mazhab critical memang sah, maka pendekatan transformis adalah pendekatan yang efektif dalam memecahkan masalah kemiskinan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah utara dan timur Kabupaten Jember merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu Kecamatan Ledokombo, Kalisat dan Silo. Hasil analisis pendapat gabungan para informan atau key persons bahwa strategi yang paling penting dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember yaitu dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Diikuti oleh kriteria berbasis program-program pendukung lain; kriteria pemberdayaan usaha ekonomi; dan kriteria berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Dengan demikian, diharapkan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember lebih diprioritaskan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya terdapat program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang mencakup Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk penanganan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik; Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW); dan Program Infrastruktur Ekonomi Pedesaan (PIEP) untuk mempercepat infrastruktur wilayah dan pedesaan (PIEP) dan juga Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif yang bertujuan untuk membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif dengan memanfaatkan potensi SDA, SDM dan teknologi. Prioritas kedua yaitu berbasis program-program pendukung lain/ Program Pro-Rakyat dengan program Kendaraan Umum dan Listrik Murah, Literasi Keuangan Untuk Masyarakat Pedesaan dan Pinggir Perkotaan, dan Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan dan Sosialisasi Pengenalan Teknologi dan Informasi. Prioritas ketiga yaitu berbasis pemberdayaan usaha ekonomi dengan program berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kredit Usaha Bersama (KUBE). Prioritas yang terakhir adalah berbasis perlindungan dan bantuan sosial dengan program berupa Program Keluarga Harapan (PKH). BPJS Kesehatan, Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Keluarga Miskin (BSM).

Upaya penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk memberikan ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan kondusif bagi tumbuhnya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri, dan tidak menekan dan mendesak mereka kepinggir atau keposisi ketergantungan. Mengutip pendapat Mulyarto (1993), jika dikaitkan dengan kebijakan yang dilaksanakan di Indonesia dalam pengentasan kemiskinan, (Dwiarto, A., 1995 : 87), mengelompokkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dalam beberapa jenis yaitu : pentrasferan sumber-sumber pembangunan dari pusat ke daerah dalam bentuk inpres; peningkatan akses kaum miskin

terhadap berbagai bentuk inpres; perluasan jangkauan lembaga perkreditan untuk rakyat kecil; pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya infrastruktur pertanian; dan pembangunan kelembagaan di daerah yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan yang diprioritaskan untuk dapat diterapkan maupun sebagai pendukung program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada di Kabupaten Jember antara lain; mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri terutama berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan; memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat pinggir perkotaan maupun pedesaan tentang produk-produk perbankan maupun teknologi informasi dengan tujuan akses masyarakat miskin terhadap perbankan maupun teknologi terbuka lebar; menyediakan sarana dan prasarana transportasi dan listrik yang relatif murah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat pedesaan dan masyarakat pinggir perkotaan; meningkatkan taraf hidup nelayan misalnya melalui pembangunan rumah layak untuk nelayan, pendidikan untuk anak-anak nelayan maupun pemberian modal dan pelatihan teknis cara menangkap ikan yang baik dan benar; menata kembali sistem sanitasi terutama di pemukiman-pemukiman kumuh yang banyak terdapat di Kabupaten Jember, karena faktor lingkungan juga berpengaruh penting terhadap masalah kemiskinan, dan lebih banyak membangun fasilitas maupun infrastruktur di pedesaan dengan tujuan akses masyarakat terhadap fasilitas-fasilitas tersebut akan lebih mudah dan dengan dibangunnya infrastruktur di pedesaan, maka diharapkan akan dapat menyerap tenaga kerja yang berakibat menurunnya angka pengangguran.

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Jember, tantangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah menerapkan secara teknis program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dirumuskan dan melakukan evaluasi yang menyeluruh pada setiap program dengan tujuan dapat mengetahui program-program yang telah berjalan baik dan program-program yang memerlukan pengoptimalan. Penulis berharap bahwa strategi penanggulangan kemiskinan tersebut tidak hanya sekedar menjadi wacana, tetapi diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Jember dapat menerapkan program-program tersebut sebagai pendukung kebijakan kemiskinan yang telah ada demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya adalah dengan menambah informan yang lebih variatif dan expert dalam bidang tersebut agar dalam analisis selanjutnya dapat lebih mendetail.

Daftar Pustaka/Rujukan

Arsyad, Hendrik. 1999. "Penentuan Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah". BPF. Yogyakarta.

Sapta Wulan Fatmasari, Dini. 2007. *Perspekti Pembangunan Ekonomi*. Jakarta.

Hendra Setiawan, Achmad. 2011. *Penanggulangan Kemiskinan Daerah*. Bandung.

Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Cetakan Keenam belas. Jakarta: CV. Rajawali.

Kuncoro, Mudrajat, 1997, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Jakarta.

Sukirno, Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keenam. Jakarta.

Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. edisi keenam. Yogyakarta: BPF

Todaro. M.P., 2000. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan. Jakarta: Erlangga.

Todaro. M.P., 2000. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Karya Ilmiah*, Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Winardi. 1983. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Edisi ketiga, Cetakan Ketiga. Bandung Tarsito.

Indrianto dan Supomo.1999. *Metodologi Penelitian*. Erlangga. Yogyakarta.

Saaty, Thomas L. 1980. *Analytical Hierarchy Process*. Yogyakarta.

Jamiel, Pyszczyński dan Shannon. 1999. *Penggunaan Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Keputusan*. Cetakan Kedua. Jakarta.

Purnomo Andri. 2013. *Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Jember*: Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Djojohadikusumo, Sumitro.1995. *Permasalahan Ekonomi Indonesia Saat Ini Dan Yang Akan Datang*. Cetakan Pertama. Jakarta. Universitas Indonesia.

Hartasi Saragih, Junawi. 2009. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Cetakan Ketiga. Jakarta.

Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo. 2003. *Indikator-Indikator Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

Sukmaraga, Prima. 2011. *Kemiskinan Dan Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangannya*. Jakarta.

Tsaniyah Firdausi, Nur. 2010. *Esensi Kemiskinan Dalam Keruangan*. Surabaya: Penerbit Universitas Airlangga Press

Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus. 1989. *Pembangunan Ekonomi*. Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Jakarta Press.

Nurkse, R. 1954. *Berbagai Kebijakan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2008. *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

